



27 OCT 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SIBOLGA**
Jalan S. Parman Nomor 84 Telepon 26450 Fax (0631) 26450
SIBOLGA

Sibolga, 27 Oktober 2020

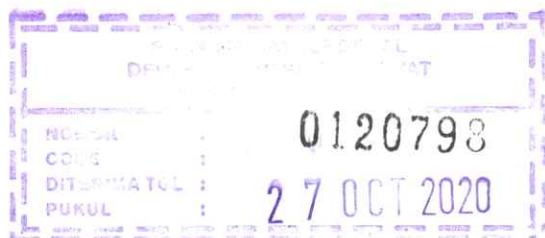
Nomor : 170/ ~~493~~ /2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 2 Lembar
Perihal : Koordinasi / Konsultasi
Pimpinan DPRD Kota Sibolga

Kepada :
Yth. Bapak Pimpinan Komisi IX DPR RI
di -
Jakarta

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan adanya aksi penolakan atas UU Cipta Kerja dari buruh dan mahasiswa yang datang ke kantor DPRD Kota Sibolga, maka Pimpinan DPRD Kota Sibolga bermaksud melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Komisi IX DPR RI yang membidangi Ketenagakerjaan terkait Protes Buruh dan Mahasiswa atas Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Terlampir Surat Pernyataan Sikap Aliansi Pemuda/Mahasiswa Sibolga–Tapanuli Tengah dan Surat Aliansi Buruh/Pekerja Sibolga–Tapanuli Tengah).

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak agar dapat menerima konsultasi dimaksud pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, pukul:13.00 WIB.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SIBOLGA
KETUA,



AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd



ALIANSI PEMUDA & MAHASISWA SIBOLGA – TAPANULI TENGAH

PERNYATAAN SIKAP

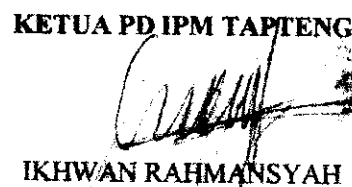
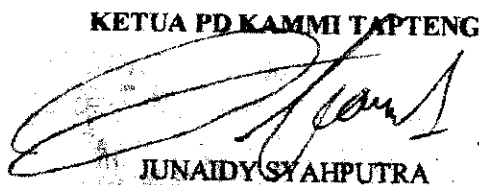
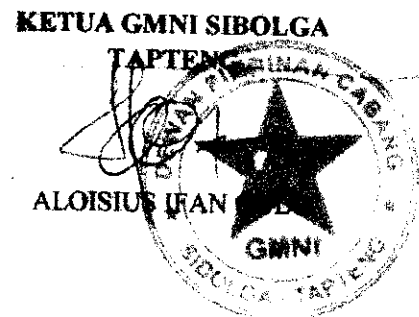
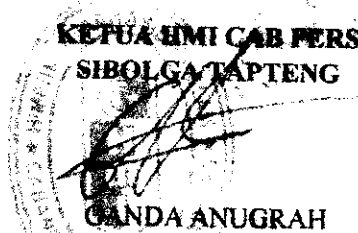
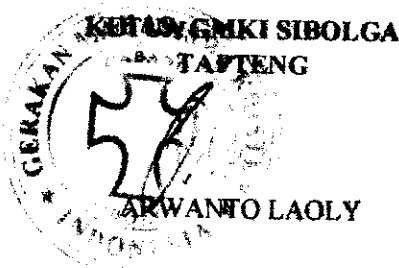
Aliansi Pemuda & Mahasiswa Sibolga - Tapteng menyatakan sikap:

1. Mosi tidak percaya kepada pemerintah tentang penegakan hukum di Indonesia
2. Menyesalkan sikap DPR RI & Pemerintah karena terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap dan keputusan dalam mengesahkan Omnibus Law
3. Menilai adanya kekeliruan penambahan hubungan kerja di Pasal 154 A tentang Tenaga kerja
4. Tolak Oligarki yang merugikan masyarakat yang mengatasmamakan Investasi
5. Atasi Virus, Cabut Omnibus.

Rabu, 7 Oktober 2020

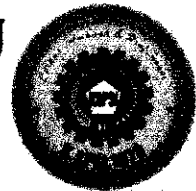
Hormat Kami :

ALIANSI PEMUDA & MAHASISWA SIBOLGA - TAPTENG





ALIANSI BURUH / PEKERJA BERSATU SIBOLGA & TAPANULI TENGAH



Sekretariat : Jl. Horas No. 134 Sibolga, HP. 081361521505, 081264021091

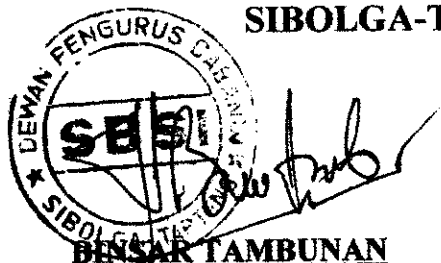
KAMI BURUH SIBOLGA YANG TERGABUNG DALAM ALIANSI BURUH SIBOLGA & TAPANULI TENGAH

MENYATAKAN :

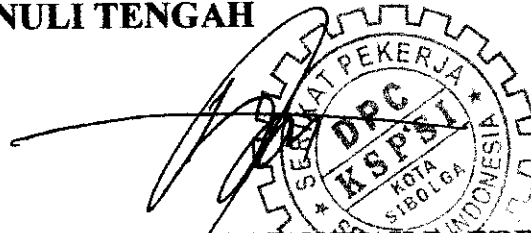
1. Menolak UU Omnibus Law Ketenagakerjaan karena melemahkan / mengkebiri hak-hak buruh:
 - Mengurangi upah, menghapus UMK, UMSK
 - Mengurangi pesangon buruh
 - Mempersulit cuti
 - Membuka peluang out sourcing seumur hidup
 - Membuka peluang kerja dengan sistem kontrak selamanya
 - Dan sebagainya
2. Memohon kepada PRESIDEN RI (Bapak Joko Widodo) tidak menandatangani UU Omnibus Law Ketenagakerjaan, yang telah disahkan DPR RI.
3. Mendukung rencana SB/SP untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sibolga, 12 Oktober 2020

ALIANSI BURUH / PEKERJA BERSATU SIBOLGA-TAPANULI TENGAH



BINSAR TAMBUNAN
Ketua DPC SBSI Sibolga-Tapteng



RAHMAD MEYDIANSYAH BAROES
Ketua DPC K.SPSI 73 Sibolga